



## PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

# INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman [inspektorat.majalengkakab.go.id](http://inspektorat.majalengkakab.go.id) Pos-el [inspektorat@majalengkakab.go.id](mailto:inspektorat@majalengkakab.go.id)

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Camat Kecamatan Jatitujuh  
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Jatitujuh dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Jatitujuh. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Kecamatan Jatitujuh** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

-

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Kecamatan Jatitujuh**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **63.75** dengan predikat “**B**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Baik**”, yaitu **Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	-	20.75	69.17%
b. Pengukuran Kinerja	30	-	17.5	58.33%
c. Pelaporan Kinerja	15	-	9	60.00%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	16.5	66.00%
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>63.75</b>	
<b>Predikat SAKIP</b>		<b>N/A</b>	<b>B</b>	

**Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Jatitujuh. Tahun 2025 sebagai berikut:**

### 1.) Perencanaan Kinerja

- a. Tidak terdapat dokumen *crosscutting*
- b. Tidak terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

- c. Belum dilakukan revidir dokumen perencanaan

## 2.) Pengukuran Kinerja

- Tidak terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
- Pimpinan tidak terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja
- Pengukuran capaian kinerja tidak memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja
- Perangkat Daerah tidak mendapat *raport kinerja triwulanan*.

## 3.) Pelaporan Kinerja

- **Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.**
- **Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)**
- Rekomendasi LKIP yang digunakan sebagai penyesuaian aktifitas mencapai kinerja
- Tidak ada Analisis keberhasilan/kegagalan mendalam dan menjawab permasalahan utama yang dihadapi

## 4.) Evaluasi Internal

terdapat kondisi masih ditemukan sebagian kecil belanja belanja yang tidak relevan dengan pencapaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

- Agar mengupload dokumen crosscutting
- Agar mengupload dokumen output/outcome baru dan perubahan target kinerja
- Agar mengupload bukti revidir dokumen perencanaan

#### 2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

- agar menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
- Pimpinan agar terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja
- Pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja
- Perangkat Daerah tidak mendapat *raport* kinerja triwulanan.

#### 3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

- **Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.**
- **Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)**
- Rekomendasi LKIP yang digunakan sebagai penyesuaian aktifitas mencapai kinerja
- agar membuat Analisis keberhasilan/kegagalan mendalam dan menjawab permasalahan utama yang dihadapi

#### 4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

-

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Kecamatan Jatitujuh. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Kecamatan Jatitujuh. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka